

# **BAB I**

## **GAMBAR UMUM PERUSAHAAN**

### **1.1 Profil Perusahaan**

PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1964, merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengklaskan kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Kegiatan klasifikasi itu sendiri adalah merupakan pengklasifikasian kapal berdasar konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian atas laik setidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Selain itu, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Load Line, ISM Code dan ISPS Code.

Beberapa pertimbangan dan alasan mengapa BKI didirikan kemudian disahkan oleh Peraturan Pemerintah PP 28/1964 tentang Pembentukan Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia:

1. Pemerintah masih menggunakan jasa klasifikasi milik asing.
2. Dalam hal aspek teknis konstruksi kapal yang dibangun untuk pengiriman domestik, kondisi yang ditetapkan oleh biro klasifikasi asing kadang-kadang tidak tepat. Karena adanya perbedaan antara perairan di Indonesia dengan di negara lain.
3. Dengan biro klasifikasi dari dalam negeri, diharapkan dapat membuka peluang untuk insinyur dari Indonesia untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan di bidang Konstruksi, Perawatan, dan pemeliharaan kapal.

Sebagai Badan Klasifikasi yang independen dan mengatur diri sendiri, BKI tidak memiliki kepentingan terhadap aspek komersial terkait dengan desain kapal, pembangunan kapal, kepemilikan kapal, operasional kapal, manajemen kapal, perawatan/perbaikan kapal, asuransi atau persewaan. BKI juga melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu dan standar teknik

yang dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jasa klasifikasi kapal.

Melihat peningkatan kegiatan dan perkembangan serta prospek usaha yang cukup cerah, di tahun 1977 Pemerintah RI selaku pemilik BKI mengupayakan peningkatan kemandirian usaha BKI dengan melakukan perubahan status badan organisasi menjadi Perseroan Terbatas, atau PT (Persero) yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

BKI didirikan untuk menghemat devisa Negara bagi layanan inspeksi kapal-kapal nasional dan mendukung kemandirian dunia industri maritim Indonesia. Melalui dukungan kerjasama dengan *Germansicher Lloyd*, German, BKI saat ini telah menjadi sebuah badan klasifikasi nasional yang besar. Hingga saat ini, selain kegiatan usaha klasifikasi, BKI juga mengembangkan kegiatannya di bidang jasa Konsultasi dan Supervisi. Berkantor pusat di Jakarta, BKI memiliki jaringan kantor cabang di pelabuhan besar seluruh Indonesia dan Singapura. Selain itu BKI juga memiliki kerjasama dengan Badan Klasifikasi Asing, baik dalam bentuk *Mutual Representative* maupun *Dual Class*.

## **1.2 Visi dan Misi Perusahaan**

### 1.2.1 Visi Perusahaan (2020–2024)

Menjadi *independent assurance* dan badan klasifikasi berkelas dunia.

### 1.2.2 Misi Perusahaan (2020-2024)

1. Memberikan nilai tambah terbaik bagi pelanggan Jasa Klasifikasi dan Statutori melalui layanan, operasi dan riset *rules* yang berstandar internasional serta berbasis pada kualitas, keselamatan dan tanggung jawab sosial - lingkungan kelautan.
2. Memaksimalkan sumber daya BKI dengan segenap potensinya agar dapat menjadi *market leader* dalam bisnis *Independent Marine Assurance*.

### 1.3 Moto Perusahaan

Dalam mewujudkan komitmen tersebut PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) memiliki Budaya Bisnis Perusahaan yang diterapkan pada seluruh jajaran organisasi. Budaya Bisnis BKI digambarkan sebagai sebuah bangunan kokoh yang terdiri atas pondasi, pilar dan atap dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pondasi dimaknai sebagai tata nilai utama yang harus di miliki oleh setiap insan BKI yaitu **KOMPAK** (KOLABORASI, KOMPENTENSI, PEDULI PELANGGAN, AMANAH, KREATIF). Insan BKI yang **KOMPAK** adalah cermin dari solidaritas BKI sebagai sikap mental yang mendasari bagaimana cara berfikir dan berperilaku Insan BKI dalam berkerja dan berkarya bagi kemajuan Perusahaan.
2. Pilar dimakani sebagai karakteristik jasa yang di dihasilkan oleh Insan BKI yaitu harus memeiliki NILAI, TAMBAH, INOVATIV, CEPAT, EFISIEN (NICE) ysng didukung oleh sistem manajemen yang handal.
3. Atap dimaknai sebagai komitmen BKI untuk menjadi perusahaan yanh BERKELANJUTAN, TERPECAYA, (JUARA) diwujudkan dengan pelayanan NOCE yang dihasilkan Insan BKI yang KOMPAK.

### 1.4 Kerjasama BKI Dengan Instansi Lain

#### 1.4.1 Bidang Klasifikasi

**Table 1.1** Bentuk kerjasama BKI dengan klasifikasi lain

<b>BIRO KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS KERJASAMA</b>
<i>American Bureau of Shipping (ABS-USA)</i>	<i>Dual Class</i>
<i>Bureau Veritas (BV-France)</i>	<i>Dual Class</i>
<i>China Classification Society (CCS-China)</i>	<i>Mutual Representative</i>
<i>Det Norske Veritas Classification AS (DnV-Norway)</i>	<i>Dual Class</i>
<i>Germanischer Lloyd (GL-Germany)</i>	<i>Dual Class</i>
<i>Hellenic Register of Shipping (HRS-Greece)</i>	<i>Mutual Representative</i>
<i>Indian Register of Shipping (IRS-Indian)</i>	<i>Mutual Representative</i>

<i>International Register of Shipping (IRS)</i>	<i>Mutual Representative</i>
<i>Korean Register of Shipping (KRS)</i>	<i>Mutual Representative</i>
<i>Korean Classification Society DPR of Korea (KCS-DPR of Korea)</i>	<i>Mutual Representative</i>
<i>Lloyd's Register of Shipping (LR-UK)</i>	Dual Class
<i>Nippon Kaiji Kyokai (NK-Japan)</i>	Dual Class
<i>Rinave Portuguesa (Portugal)</i>	Mutual Representative
<i>Ships Classification Malaysia (SCM-Malaysia)</i>	Mutual Representative
<i>China Cooperation of Shipping (CCS)</i>	Mutual Representative
<i>Vietnam Register (VR-Vietnam)</i>	Mutual Representative

#### 1.4.2 Bidang Komersil

**Table 1.2** Kerjasama BKI pada bidang komersil

<b>ORGANIZATION</b>	<b>JENIS KERJASAMA</b>
<i>Det Norske Veritas (DnV-Norway)</i>	<i>Offshore Services</i>
<i>Korean Register of Shipping (KRS-ROK)</i>	<i>Industrial Inspection</i>
<i>Tuv Rheinland (Germany)</i>	<i>Industrial Inspection</i>
Angkutan Sungai Danau & Penyeberangan (ASDP)	Perencanaan dan pengawasan perawatan kapal. Pendidikan dan pelatihan pegawai
<i>Metal Performance Assessment Group (MPAG)</i>	<i>Engineering Consulting</i>
PT. Dimensi Barumas Perdana	Tangki penimbun
PT. Surveyor Maritim Indonesia (SUMARINDO)	Konsultansi dan supervisi kapal
PT. Gametri Tirta Lestari	Pembersihan dan pengolahan limbah padat atau cair
Koperasi Pegawai Negeri Sipil Ditjen Migas (KPDM)	Inspeksi, supervisi, konsultasi teknis dan pelatihan bidang migas Inspeksi kapal yang beroperasi di lingkungan migas
PT. Dirgantara Indonesia	SDM dan laboratorium pengujian
Koperasi Patra Mandiri Persada (SPPSI)	Inspeksi dan NDT
Konsorsium Asuransi	Program asuransi perlindungan aset-aset
PT. Enggong Sayap Perkasa (ESP)	Inspeksi dan NDT bidang migas
PT. Graha Purnalitra Consultant	Supervisi dan konsultansi
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)	Penilaian teknis kapal ikan milik anggota HNSI

### 1.4.3 Kerjasama Lainnya

**Table 1.3** *Kerjasama Lainnya*

<p><b>Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.</b> Kesepakatan Bersama antara PT BKI (Persero) Dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang Bantuan Penanganan Permasalahan Di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara No. B.00955/HK.503/KI-20</p>
<p><b>PT Dinamika Utama Jaya.</b> Nota Kesepahaman antara PT Dinamika Utama Jaya dengan PT BKI (Persero) tentang Kerjasama di Bidang Klasifikasi Kapal dan Bidang Penanjang Lainnya No. B.01082/HK.503.KI-20</p>
<p><b>PT Rekayasa Teknologi Global.</b> Nota Kesepahaman antara PT BKI (Persero) BKI Academy dengan PT Rekayasa Teknologi Global tentang Penyelenggaraan Pendidikan/ Pelatihan No. 041/HK.503/KI-20</p>
<p><b>Universitas Indonesia.</b> Nota Kesepakatan Bersama antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Indonesia tetang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Bidang Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Pendayagunaan Kemampuan Perakayasaan Industri</p>
<p><b>Institut Teknologi Nasional Bandung.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Institut Teknologi Bandung No. B.02531/HK.503/KI-20</p>
<p><b>STIE Tri Dharma Widya.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan STIE Tri Dharma Widya No. B.02538/HK.503/KI</p>
<p><b>STMIK Widya Cipta Dharma.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan STMIK Widya Cipta Dharma No. B.02549/HK.503/KI</p>
<p><b>Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang No. B.02526/HK.503/KI</p>
<p><b>Universitas Dian Nusantara.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Dian Nusantara No. B.02527/HK.503/KI</p>
<p><b>Universitas Ichsan Gorontalo.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Ichsan Gorontalo No. B.02528/HK.503/KI</p>

<p><b>Universitas Pelita Bangsa.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Pelita Bangsa No. B.02533/HK.503/KI</p>
<p><b>Universitas Tama Jagakarsa.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Tama Jagakarsa No. B.02524/HK.503/KI</p>
<p><b>STIE Muhammadiyah Jakarta.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan STIE Muhammadiyah Jakarta No. B.02553/HK.503/KI</p>
<p><b>Universitas Bhayangkara.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Bhayangkara No. B.02524/HK.503/KI</p>
<p><b>Universitas Wiraraja.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Wiraraja No. B.02524/HK.503/KI</p>
<p><b>Universitas Dharmawangsa.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Dharmawangsa No. B.02525/HK.503/KI</p>
<p><b>Universitas Binawan.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Binawan No. B.02543/HK.503/KI</p>
<p><b>Akamigas Balongan.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Akamigas Balongan No. B.02530/HK.503/KI</p>
<p><b>Universitas As-Syafi'iyah.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas As-Syafi'iyah No. B.02532/HK.503/KI</p>
<p><b>Universitas Islam Jakarta.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Islam Jakarta No. B.02523/HK.503/KI</p>
<p><b>Unikom Bandung.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Unikom Bandung No. B.02540/HK.503/KI</p>
<p><b>Universitas Budi Luhur.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Budi Luhur No. B.02548/HK.503/KI</p>
<p><b>STIE Jayakarta.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan STIE Jayakarta No. B.02544/HK.503/KI</p>

<b>STMIK Jayakarta.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan STMIK Jayakarta No. B.02545/HK.503/KI
<b>Universitas Faletehan.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Faletehan No. B.02541/HK.503/KI
<b>Akper Harum.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Akper Harum No. B.02552/HK.503/KI
<b>Akademi Maritim Jaya Raya.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Akademi Maritim Jaya Raya No. B.02529/HK.503/KI
<b>Sekolah Tinggi Ilmu Maritim AML.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Ami No. B.02537/HK.503/KI
<b>Universitas Satya Negara Indonesia.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Satya Negara Indonesia No. B.02551/HK.503/KI
<b>Universitas Persada Indonesia YAI.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Universitas Persada Indonesia YAI No. B.02565/HK.503/KI-20
<b>Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan.</b> Nota Kesepahaman antara PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan No. B.02539/HK.503/KI-20

#### 1.4.4 Keanggotaan Asosiasi

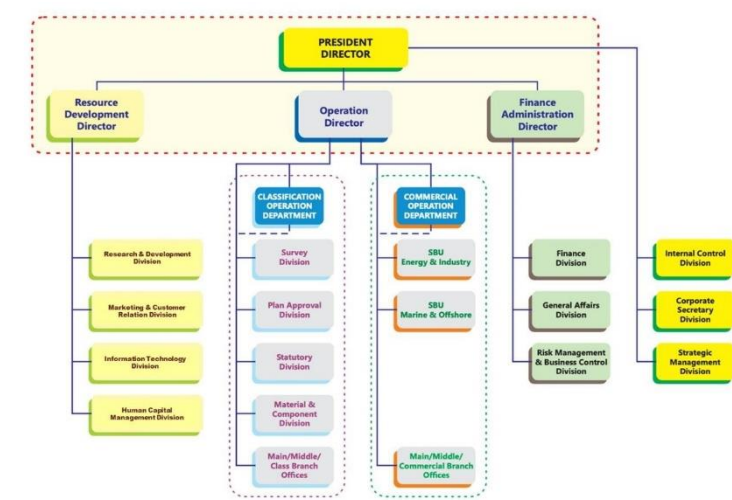
**Table 1.4** *Keanggotaan Asosiasi*

<b>INSTITUSI</b>
Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
Asosiasi Perusahaan Inspeksi Teknik Indonesia (APITINDO)
Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO)
Asosiasi Independen Surveyor Indonesia (AISII)
Asosiasi Pengelasan Indonesia (API)

## 1.5 Struktur Organisasi BKI

Struktur Organisasi BKI terdiri dari Direktur Klasifikasi, Direktur Komersil, Direktur Keuangan dan Administrasi, Divisi, Satuan, Bagian dan Sub Bagian. Organisasi

Meliputi Kantor Pusat dan Unit Produksi yang tersebar di seluruh Indonesia dan Singapura. Selain jabatan struktural, terdapat jabatan fungsional yang meliputi surveyor, inspektur, operator, staf teknik dan lain-lain



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BKI

## 1.6 Ruang Lingkup Kegiatan

### 1.6.1 Bidang Klasifikasi

1. Menerbitkan buku-buku peraturan klasifikasi dan konstruksi kapal.
2. Melaksanakan survey kapal baik untuk bangunan baru maupun untuk bangunan lama dan menerbitkan sertifikat-sertifikat.
3. Melaksanakan survey dalam rangka mempertahankan kelas kapal secara periodik maupun khusus.
4. Menyetujui gambar-gambar konstruksi kapal, baik lambung maupun instalasi mesin maupun instalasi listrik kapal.
5. Pengujian material plat dan menerbitkan sertifikat plat.
6. Pemeriksaan, pengujian dan menerbitkan sertifikat mesin, peralatan dan perlengkapannya yang akan dipasang pada kapal.
7. Menguji dan mengeluarkan sertifikat juru las kapal.



8. Melaksanakan survei dan menerbitkan sertifikat atas nama Biro Klasifikasi Indonesia dan menjalin kerjasama dengan pihak yang saling mewakili BKI.
9. Menerbitkan buku-buku register, survey status dan publikasi-publikasi lainnya yang berkaitan dengan bidang maritime.

#### 1.6.2 Kegiatan Komersil

Untuk memenuhi jasa di bidang *marine* dan *non marine*, maka PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) memperluas usaha konsultasi supervisi yang terdiri dari empat bidang yaitu Bidang Pengujian, Inspeksi, Rekayasa Teknik, dan INKOMAR dan Jasa Umum yang menyediakan jasa antara lain:

1. Design yang meliputi: kapal bangunan baru, modifikasi dan desain awak kapal untuk bangunan baru.
2. Menyusun program pemeliharaan, perbaikan dan modifikasi serta rekondisi kapal.
3. Pengawasan pembangunan, modifikasi, rekondisi, perbaikan konstruksi dan permesinan kapal.
4. Sertifikat untuk Departemen Tenaga Kerja RI: mengadakan pemeriksaan dan pengujian ketel-ketel uap, bejana tekan, pesawat angkut kepada semua industri perkapalan.
5. Sertifikat untuk Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi yang meliputi: Keselamatan industri konstruksi instalasi, bejana tekan, pompa, kompresor untuk industri minyak dan gas bumi di darat.
6. Inspeksi pihak ketiga untuk pemeriksaan material, kompresor, struktur perancangan dan operasi yang meliputi: *Power Plant, Chemical Plant, Tank system and Pipe Lines, Railway Material, Rotaring Machinery, Crank, Lighting System, Cooling System, Fire Fighting System.*

### 1.6.3 Tugas dan Tanggung Jawab PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

Keselamatan kapal baik pada saat kapal sedang di laut ataupun pada waktu kapal di dermaga, tidak terlepas dari peran penting pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan, dimana tugas dan tanggung jawab dilimpahkan kepada sub-sektor perhubungan laut yang mempunyai dua tugas pokok yaitu:

- A. Mengatur pelaksanaan teknis pembuatan kapal dan perubahan atau modifikasi serta peralatan kapal.
- B. Meneliti pelaksanaan perawatan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu di dalam Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan RI terdapat Direktorat Pelayanan Perkapalan (DITKAPEL), yang mempunyai tugas yaitu pengawasan dibidang perkapalan serta keselamatan dan peraturan-peraturan pelayaran serta keamanan dalam pelayaran.

Sedangkan instansi lain yang mempunyai fungsi yang sama dengan DITKAPEL adalah PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero), hanya saja PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) tugasnya dititik beratkan pada bidang klasifikasi yang merupakan bagian dari keselamatan awak kapal dan penumpang maupun keselamatan dari kapal tersebut, sehingga DITKAPEL mempunyai koreksi fungsi dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang tercermin dalam pengkelasan kapal-kapal berbendera Indonesia.

Pengawasan kondisi teknis yang merupakan tugas dari BKI diawali dengan rancangan berupa gambar-gambar dan perhitungan Pratama, disamping itu proses pembuatan bahan-bahan dan mesin yang akan dipasang di kapal, hingga kapal tersebut selesai dibangun dan pengoperasiannya hingga batas maksimum nilai teknis dari kapal tersebut.

Adapun persyaratan dari lambung kapal, perlengkapan mesin dan ha-hal yang dimaksud diatas merupakan unsur-unsur Pratama bagi laik lautnya sebuah kapal. Apabila suatu kapal dalam kondisi laik laut, maka keselamatan awak dan penumpang kapal serta barang-barang yang dibawa maupun kapal itu sendiri secara teknis dapat terjamin.